

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berperan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan potensi individu secara utuh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan tersebut menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, pemerintah Indonesia menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut menuntut tersedianya sumber daya manusia yang unggul, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing dalam era global yang ditandai oleh kemajuan teknologi, digitalisasi, dan dinamika sosial ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Pendidikan juga memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan, nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan semangat gotong royong dapat ditanamkan secara sistematis kepada peserta didik. Dalam menghadapi tantangan global seperti revolusi industri 4.0, transformasi digital, serta tuntutan kompetensi abad ke-21, satuan pendidikan dituntut untuk dikelola secara profesional dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Pengelolaan pendidikan yang baik tidak hanya mencakup aspek pembelajaran, tetapi juga mencakup tata kelola kelembagaan dan pengelolaan sumber daya, termasuk pengelolaan keuangan sekolah.

Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen satuan pendidikan. Keuangan sekolah menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, hingga evaluasi dan pengembangan mutu pendidikan. Pengelolaan keuangan yang tidak tertib dan tidak akuntabel berpotensi menghambat pencapaian tujuan pendidikan, bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keberlangsungan operasional pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemerintah menyediakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana BOSP merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional satuan

pendidikan, terutama pembiayaan nonpersonalia, sehingga sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan tanpa membebani peserta didik dan orang tua secara berlebihan. Keberadaan Dana BOSP juga diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Secara normatif, pengelolaan Dana BOSP harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, pengelolaan Dana BOSP juga harus mengacu pada prinsip akuntabilitas keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Meskipun Dana BOSP telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung operasional sekolah, dalam praktiknya pengelolaan dana tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Berbagai laporan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Permasalahan yang sering dijumpai antara lain keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian penggunaan dana dengan petunjuk teknis, serta lemahnya sistem pengawasan internal sekolah.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi bahkan penyimpangan penggunaan dana pendidikan.

Dalam rangka memperbaiki tata kelola Dana BOSP dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah penerapan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai sistem terintegrasi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Aplikasi ARKAS dirancang untuk membantu satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan anggaran, melaksanakan penggunaan dana, serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara sistematis dan berbasis digital.

Penggunaan ARKAS sebagai aplikasi resmi pengelolaan Dana BOSP ditegaskan dalam berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur sinkronisasi pengelolaan keuangan sekolah dengan sistem keuangan daerah. Regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025, semakin menegaskan peran ARKAS sebagai instrumen utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana BOSP.

Secara konseptual, penerapan ARKAS diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan Dana BOSP. Melalui sistem digital, proses perencanaan anggaran dapat dilakukan

secara lebih terstruktur, penggunaan dana dapat dipantau secara berkala, dan pelaporan keuangan dapat disusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Selain itu, ARKAS juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengawasan yang memungkinkan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan monitoring pengelolaan keuangan sekolah secara lebih efektif.

Namun demikian, implementasi aplikasi ARKAS di tingkat satuan pendidikan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kebijakan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan sekolah sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah. Keterbatasan kompetensi operator, rendahnya literasi digital pengelola keuangan sekolah, serta kendala jaringan internet masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penggunaan ARKAS.

Kondisi tersebut juga berpotensi terjadi pada satuan pendidikan menengah atas, termasuk SMA Negeri yang telah terakreditasi A. Status akreditasi A secara normatif menunjukkan bahwa sekolah telah memenuhi standar mutu pendidikan yang ditetapkan, namun tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh aspek tata kelola sekolah, khususnya pengelolaan keuangan berbasis digital, telah berjalan optimal. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan kondisi geografis sekolah dapat mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan pengelolaan Dana BOSP melalui aplikasi ARKAS.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial dan kompetensi sumber daya manusia di tingkat satuan pendidikan. (Ardita et al., 2025) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan dana pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besaran dana yang diterima sekolah, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam merencanakan anggaran, melaksanakan penggunaan dana secara tepat, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan keterbatasan kompetensi pengelola keuangan sekolah seringkali menjadi faktor utama terjadinya ketidaksesuaian penggunaan dana pendidikan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Susanti & Nafi'ah, 2023) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOSP sangat bergantung pada keterlibatan pemangku kepentingan sekolah, termasuk kepala sekolah, bendahara, serta komite sekolah. Ketiadaan sistem pelaporan yang terstandar dan mudah diakses berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan dana dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Temuan ini menguatkan pentingnya penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis digital dalam pengelolaan Dana BOSP.

Dalam konteks tersebut, aplikasi ARKAS hadir sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan klasik dalam pengelolaan keuangan sekolah. ARKAS tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sistem pengendalian internal yang memungkinkan sekolah melakukan perencanaan berbasis kebutuhan, pelaksanaan anggaran yang terstruktur, serta pelaporan keuangan yang dapat ditelusuri dan diverifikasi. Dengan demikian, implementasi ARKAS memiliki posisi strategis dalam mendukung tata kelola keuangan sekolah yang baik (*good school governance*).

Namun demikian, realitas implementasi ARKAS di berbagai daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet, gangguan server, serta rendahnya literasi teknologi informasi pengelola keuangan sekolah masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penggunaan ARKAS. Selain itu, pelatihan yang bersifat singkat dan tidak berkelanjutan menyebabkan sebagian pengelola keuangan sekolah belum sepenuhnya memahami fitur dan mekanisme kerja aplikasi ARKAS secara komprehensif.

Kendala tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah. Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat, memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga daerah perbukitan dan perdesaan. Kondisi geografis ini berdampak pada ketersediaan

infrastruktur teknologi, khususnya akses jaringan internet yang stabil. Dalam situasi seperti ini, penerapan sistem digital seperti ARKAS membutuhkan dukungan infrastruktur dan kebijakan pendamping yang memadai agar dapat berjalan secara optimal.

SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan secara normatif telah memenuhi standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Status akreditasi A menunjukkan bahwa sekolah memiliki kualitas yang baik dari aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, serta manajemen sekolah. Namun demikian, status akreditasi tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh aspek tata kelola sekolah, khususnya pengelolaan keuangan berbasis digital, telah berjalan secara optimal dan bebas dari kendala implementatif.

Dalam praktiknya, sekolah dengan status akreditasi A tetap menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan Dana BOSP melalui aplikasi ARKAS. Tantangan tersebut meliputi perbedaan tingkat kompetensi sumber daya manusia antar sekolah, beban administratif yang cukup tinggi, serta keterbatasan waktu dan pendampingan teknis bagi pengelola keuangan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh status akreditasi sekolah, tetapi juga oleh kesiapan sistem dan dukungan kebijakan yang menyertainya.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 menekankan bahwa pengelolaan Dana BOSP harus selaras dengan pemenuhan dan peningkatan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hal ini menunjukkan bahwa Dana BOSP tidak hanya diposisikan sebagai dana operasional rutin, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan dan penggunaan Dana BOSP melalui ARKAS seharusnya diarahkan pada program-program prioritas sekolah yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam konteks ini, implementasi ARKAS menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga dari aspek manajerial dan kebijakan. Kajian implementasi ARKAS perlu melihat bagaimana sekolah memahami regulasi, menyusun perencanaan anggaran, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Selain itu, kajian tersebut juga perlu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi sekolah serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Hingga saat ini, penelitian mengenai implementasi aplikasi ARKAS masih didominasi oleh kajian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, serta masih terbatas pada wilayah tertentu. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi ARKAS pada SMA Negeri terakreditasi A, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis seperti Kabupaten Pesisir Selatan, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang manajemen pendidikan dan kebijakan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik implementasi ARKAS, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengungkap upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana BOSP.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian manajemen dan administrasi pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi satuan pendidikan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekolah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan serta memperkuat peran Dana BOSP sebagai instrumen strategis dalam pembangunan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul dari penelitian ini adalah **“Implementasi Aplikasi ARKAS Dalam Pengelolaan Dana BOSP Pada SMA Negeri Terakreditasi A Di Kabupaten Pesisir Selatan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan Dana BOSP melalui aplikasi ARKAS pada SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengimplementasikan aplikasi ARKAS pada pengelolaan Dana BOSP ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala implementasi aplikasi ARKAS pada pengelolaan Dana BOSP ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan Dana BOSP melalui aplikasi ARKAS pada SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengimplementasikan aplikasi ARKAS pada pengelolaan Dana BOSP.
3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala implementasi aplikasi ARKAS pada pengelolaan Dana BOSP.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pendidikan dan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa pada jenjang dan konteks wilayah yang berbeda.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Satuan Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOSP melalui aplikasi ARKAS.

2. Bagi Dinas Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi pendukung dalam perumusan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOSP pada SMA Negeri, khususnya yang terakreditasi A.

3. Bagi Peneliti

penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis dan akademik dalam bidang manajemen pendidikan, serta sebagai syarat penyelesaian studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.

### **1.4.3 Manfaat Kebijakan**

1. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman empiris yang lebih jelas tentang bagaimana Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 diterapkan di sekolah dan bagaimana hal itu berdampak pada pengelolaan pendidikan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien kebijakan tersebut dalam aktivitas sehari-hari sekolah.
2. Penelitian ini bisa berfungsi sebagai sumber yang komprehensif bagi pengawas sekolah dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pengawasan, pemantauan, serta evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Mereka bisa memanfaatkan informasi yang disediakan untuk merumuskan strategi, melakukan perbaikan, dan mengambil keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

BAB I berisikan susunan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan susunan konsep implementasi kebijakan publik, pengelolaan keuangan pendidikan, dana bantuan operasional stuan pendidikan (BOSP), aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS), keterkaitan implementasi ARKAS dengan pengelolaan BOSP, kerangka konseptual, dan penelitian terdahulu.

BAB III berisikan susunan dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisa data, dan etika penelitian.

BAB IV berisikan susunan dari hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V merupakan kesimpulan dan Implikasi Penelitian yang berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.